

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU OLEH PAKEM (PANITIA KEMITRAAN) DI KELURAHAN SAIGON KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

Budi Kurniawan

Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tanjungpura, Pontianak

Email: Budikurniawan989@rocketmail.com

Abstrak

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu mempunyai tujuan untuk memperkuat kemitraan antara masyarakat melalui lembaga masyarakat lembaga swasta serta pemerintah kota baik ditingkat kelurahan maupun ditingkat kota. Salah satu kebijakan serta strategi pemerintah kota Pontianak dalam menanggulangi kemiskinan yaitu dengan menjalankan Program PAKET melalui kemitraan antara masyarakat swasta dan pemerintah kota sehingga menimbulkan keterpaduan dalam ketiga unsur ini dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. terdapatnya beberapa permasalahan dalam pelaksanaan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan khususnya di kelurahan Saigon diantaranya masih kurang aktifnya misalnya dalam kegiatan penyusunan proposal anggaran PAKET yang terlambat karena tidak hadirnya salah satu unsur organisasi PAKET itu sendiri, serta Jadwal pencairan anggaran yang tidak sesuai mekanisme penggunaan dana sehingga program tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Penanggulangan kemiskinan terpadu, Organisasi PAKEM, Prosedur Pelaksanaan.

Abstrack

Integrated Poverty Reduction Program (PAKET) has the objective to strengthen the partnership between the public through public institutions of private and government institutions both at village and town level city. One of the government's policies and strategies in tackling poverty Pontianak city is to run a PAKET Program through a partnership between the public and the private sector, giving rise to the city government coherence in these three elements in poverty alleviation through community empowerment. presence of several problems in the implementation of the Urban Poverty Program implementation especially in villages which are still less active Saigon for example in the preparation of budget proposals PAKET late because no one element presence PAKET organizations themselves, as well as the disbursement schedule is not appropriate use of funding mechanisms so that program can not function properly.

Key Words: Integrated Poverty Reduction Program, PAKEM organizations, Implementation Procedures.

1. PENDAHULUAN

Program Penanggulangan kemiskinan Terpadu (PAKET) yaitu komponen dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP *advance*) serta merupakan program intervensi dari Proyek pada tahapan kemandirian sebagai sarana/alat pembelajaran untuk membangun kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli, maupun pihak swasta (bank dunia), sehingga upaya

penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan yang bertujuan untuk melembagakan kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli setempat untuk membangun "Gerakan Kemitraan" yang mengacu pada Undang Undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pemberantasan Kemiskinan Nasional (PROPENAS), dimana pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas. Hal ini dilakukan oleh

P2KP *Advanced* dalam rangka menjembatani pihak *stakeholders* atau pemerintah daerah Kota Pontianak dengan Badan Keswadayaan Masyarakat sebagai bagian dari masyarakat dan juga dari kelompok peduli, sebagai upaya keterpaduan pelaku-pelaku penanggulangan kemiskinan di Kota Pontianak.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kecamatan Pontianak Timur khususnya di Kelurahan Saigon belumlah berjalan dengan baik, karena Keterlambatan pelaksanaan program P2KP PAKET *advance* di karenakan kurangnya partisipasi atau kerja sama yang solit antara ketiga unsur Panitia Kemitraan (PAKEM) yang ada serta Jadwal pencairan anggaran yang tidak sesuai mekanisme atau prosedur program penggunaan dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Mengacu pada uraian latar belakang masalah sebelumnya maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Proses Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Bidang Perbaikan Jalan di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur?.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur dengan waktu penelitian selama 3 bulan terhitung dari observasi awal pada bulan juni 2012 sampai dengan pelaporan hasil penelitian september 2012. Metode yang digunakan adalah kualitatif karena permasalahan yang di teliti terkait aspek pelaksanaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan atau subjek penelitian yaitu: (1) Lurah Saigon Kecamatan Pontianak Timur (2) Pihak PAKET P2KP melalui Panitia Kemitran (PAKEM) (3) Pihak Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK). (4) Kasubid Kesra Bappeda kota pontianak.

Adapun Teknik Pengumpulan Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: (1) teknik pengamatan langsung (observasi

langsung). (2) Teknik Wawancara (3) teknik Dokumentasi dan instrument atau alat pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini berupa (1) pedoman observasi . (2) pedoman wawancara. (3) Kamera dan Video Handphone: alat ini untuk mendokumentasikan beberapa dokument dan merekam hasil dari wawancara pada saat penelitian langsung.

Pada penelitian ini data yang di peroleh dari responden maupun informan, kemudian di klasifikasikan menurut jenisnya dan selanjutnya di olah dengan menggunakan metode kualitatif serta kemudian di analisis. Data yang terkumpul tidak selamanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan fokus penelitian bahkan mungkin terjadi kesalahan maupun kekurangan untuk itu diperlukan pengecekan ulang terhadap kebenaran data yang sudah terkumpul (Moleong, 2004:97), yang mana dalam hal ini maka peneliti akan menggunakan teknik (1) Meringkas (*reduksi*) (2) Memaparkan (*display*) (3) menyimpulkan (*verifikasi*), dari hasil observasi dan wawancara.

2. Organisasi PAKEM

Organisasi PAKEM di bentuk merupakan untuk persyaratan dalam mendapatkan dana PAKET P2KP *advance* yaitu yang bertujuan dalam pelaksanaan kegiatan/supproyek PAKET P2KP *advance*, kedudukan serta hubungan PAKEM dengan perangkat aparatur pemerintah kota dan organisasi masyarakat formal lainnya di tingkat kelurahan maupun kecamatan tidak bersifat struktur formal, melainkan hubungan yang bersifat koordinatif, fungsional dan komplementer atau saling melengkapi serta mendukung satu sama lain". Dalam rangka kolaborasi atau kerja sama antar pemerintah kota kelompok peduli dan masyarakat melalui (BKM) melakukan kegiatan sub proyek PAKET P2KP *advance*. dengan demikian melalui PAKEM masyarakat memiliki lembaga sosial kontrol dalam pelaksanaan PAKET P2KP *advance*, bukan itu saja, PAKEM yang telah dibentuk

ini diharapkan akan terus dipelihara tidak hanya sebatas adanya PAKET P2KP *advance*, akan tetapi setelah P2KP ini sukses lembaga ini tetap eksis, apapun namanya yang penting masyarakat sudah memiliki lembaga yang dapat mereka manfaatkan bagi kepentingan pembangunan desa dan pinggiran perkotaan khususnya di kelurahan Saigon. keterlibatan 3 unsur dalam komponen PAKET ini yaitu bekerja sama dalam kegiatan sup proyek PAKET P2KP *advance* baik dalam pengusulan penyusunan proposal PAKET dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi maupun evaluasi di dalam pencapaian keberhasilan PAKET P2KP *advance* di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, dalam proses kebijakan publik implementasi kebijakan merupakan tahapan praktis yang di pandang sebagai tahapan yang bersifat reoritis. Anderson (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa : " policy implementation,.. is the stage of policy making between the establishment of the policy ..and the consequences of the polocy for the people whom it affect". Sedangkan Grindle (dalam Tachan, 2008: 30) mengemukakan bahwa: " implementation – a general process of administrative action that can be invesigated at specific program levell". Dari uraian di atas di peroleh suatu gambaran bahwa kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang di lakukan setelah kebijakan sudah di setuju / ditetapkan. Kegiatan ini ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan / menafsirkan alternatif-alterantif yang bersifat kongkrit atau mikro. sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika bottom up , dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik lalu di ikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk di tetapkan.

Jika bisa di simpulkan setidaknya ada 2 poin yang menjadi standar dan sasaran

dalam proses Implementasi Program Penanggulangan kemiskinan Perkotaan (1) Apakah proses kerjasama organisasi PAKET berjalan sesuai dengan prosedur yang ada? (2) Apakah pelaksanaan progarm sesuai sasaran dan benjalan sebagaimana mestinya?.

PAKET P2KP sebagai program penanggulangan kemiskinan di perkotaan lebih mengutamakan pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan mendudukkan masyarakat sebagai pelaku utamanya melalui partisipasi aktif. Melalui partisipasi aktif masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran tidak hanya berkedudukan menjadi obyek program, tetapi ikut serta menentukan program yang paling cocok bagi mereka. Mereka memutuskan, menjalankan, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan program. Nasib dari program, apakah akan terus berlanjut atau berhenti, akan tergantung pada tekad dan komitmen masyarakat sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Kasubid Kesra Bappeda Kota Pontianak menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Saigon diperlukan organisasi yang mampu menjadi wadah atau tempat komunikasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan melalui kemandirian dan pemberdayaan masyarakat sebagai syarat keikutsertaan seluruh anggota masyarakat melalui komponen PAKET” .

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Lurah Saigon menyangkut masalah tindakan yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan PAKET P2KP *advance* menurut beliau ”Sudah berjalan dengan baik dimana dari tiga tujuan PAKET P2KP

advance telah terlaksana baik dari pembentukan organisasi PAKEM yang menjadi wadah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, sampai dengan pemberdayaan di tingkat masyarakat yaitu dengan meningkatkan akses masyarakat miskin melalui perbaikan prasarana fisik jalan dan lingkungan, maupun penguatan peran pemerintah daerah yaitu bermitra dengan masyarakat yang saling berkomunikasi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan". Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Saigon dan pihak PAKEM dan tim fasilitator dapat disimpulkan bahwa:

"Tujuan Program PAKET P2KP *advance* sudah terlaksana dengan sebagaimana mestinya tetapi hasilnya tidak begitu maksimal disebabkan ada kelemahan atau hambatan dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan PAKET P2KP *advance* itu sendiri".

Beberapa kelemahan atau hambatan yang masih sering menjadi kendala dalam proses pelaksanaan dan penyelenggaraan salah satunya adalah keterbatasan kualitas pelaksana, terutama pada ketepatan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan publik seperti perbaikan jalan yang tidak tepat waktu.

3. Penerapan Pelaksanaan

Dalam program PAKET P2KP *Advance* di Kecamatan Pontianak Timur juga dibentuk birokrasi yang didalam mengimplementasikan kegiatan program dijabarkan dalam suatu bentuk tim-tim pelaksana yaitu kampanye kegiatan PAKET P2KP *advance* ditingkat kecamatan maupun ditingkat kelurahan baik berupa informasi media masa maupun media telekomunikasi serta pemasangan iklan, sosialisasi maupun pembentukan PJOK PAKET P2KP *advance* serta pemanfaatan dana PAKET P2KP *advance*, Di dalam permasalahan disini penulis mencoba mengkaji tim yang terlibat

dalam proses pelaksanaan atau implementasi program PAKET P2KP *advance* dalam kepatuhannya dalam melaksanakan prosedur maupun aturan main pelaksanaan program PAKET P2KP *advance*.

Dari data yang diperoleh dilapangan implementasi pencairan anggaran/ dana Program Penanggulangan Kemiskiaann Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Saigon memperlihatkan tingkat kepatuhan yang rendah, pernyataan tersebut dapat diperjelas dengan adanya jadwal pencairan anggaran yang tidak sesuai mekanisme atau prosedur program penggunaan dana Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

Keterlambatan pencairan dana yang seharusnya diterima oleh pihak pelaksana pada tgl 4 juni 2012 tapi pada kenyataannya anggaran tersebut baru dapat diterima oleh pihak pelaksana pada tgl 4 September 2012. Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan program.

Kendala yang kedua dana yang didapat pada umumnya belum dapat memenuhi kebutuhan, argumen tersebut dinyatakan Pihak PAKEM bahwa:

"sebagaimana kita ketahui secara umum memang dana PAKET P2KP *Advance* yang kita terima belum mencukupi untuk biaya operasional kegiatan".

Setelah penulis melakukan wawancara lebih lanjut terhadap informan kunci : apa yang akan bapak lakukan apabila dana PAKET P2KP *Advance* tersebut tidak cukup/kurang?

"kami disini pihak pelaksana mengajak untuk musyawarah dan menentukan kegiatan apa yang di proritaskan".

Faktor di atas adalah merupakan salah satu penyebab tidak patuhnya pelaksana pada aturan yang ada tanpa ada dukungan dana yang belum mencukupi untuk melaksanakan program tersebut pendapat diatas diperjelas oleh Unit

Pengelola Keuangan (UPK) ia mengatakan bahwa:

“sebenarnya dana yang diterima tidak cukup, tapi cukup atau tidaknya dana tersebut ya harus kami terima”.

Dengan keadaan dana yang tidak memungkinkan sehingga mendorong mereka untuk tidak patuh dan taat pada peraturan yang ada. Setelah itu keadaan yang ketiga kurangnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pelatihan yang menerima dana PAKET P2KP *Advance*, sehingga terjadi kurang pemahaman oleh implementor yang bersangkutan. Menurut devi selaku Unit Pengelola Keuangan (UPK) mengatakan:

“saya sendiri tidak mengerti atau mengetahui apa kegunaan dana PAKET P2KP *Advance*”.

Hal ini terlihat pada minimnya informasi yang diterima oleh pihak pelaksana akibat dari kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Tingkat pendidikan yang rendah dan kurang sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara dan informasi yang kurang sehingga menyebabkan tidak mengerti atau kurang pemahaman dari objek penelitian implementasi kebijakan tersebut. Hal ini merupakan salah satu penyebab kenapa mereka tidak patuh karena minimnya informasi yang mereka terima sehingga membuat mereka tidak mau memberikan dukungan sepenuhnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah dan merupakan kendala yang sangat mempengaruhi dalam sebuah implementasi kebijakan, tanpa adanya kepatuhan dari implementor maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Simpulan dan Saran

1. Organisasi PAKEM

Pemerintah Kelurahan Saigon dalam hal ini melalui organisasi kemitraan (PAKEM) antara organisasi lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan Kelurahan, sebaiknya memprogramkan untuk mengutus minimal 3 (tiga) orang petugas untuk dapat mengikuti pendidikan dan latihan dibidang keahlian pelaksana, sehingga para petugas yang telah memperoleh pendidikan dan latihan agar dapat bekerja lebih baik dan professional. Perlunya penguatan kepada pelaku-pelaku penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan kegiatan PAKET P2KP *Advance*. Dalam hal ini adalah penguatan Kelembagaan Panitia Kemitraan (PAKEM), Aparat Pemerintahan dan Masyarakat serta Panitia Kemitraan yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP *Advance* nya nanti akan dapat berjalan sebagaimana mestinya melalui sosialisasi mendalam tentang penggunaan dana PAKET P2KP *Advance* setiap tahunnya kepada relawan atau petugas yang melakukan pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP *Advance* di Kelurahan Saigon guna pentingnya para pelaksanaan mengetahui secara jelas dan pasti kegunaan dana PAKET P2KP *Advance* sehingga tidak menimbulkan kebingungan.

2. Penerapan Pelaksanaan

Tingkat kepatuhan terhadap aturan main dalam pelaksanaan PAKET P2KP di Kelurahan Saigon masih rendah dikarenakan ada beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi oleh pelaksana yaitu lambatnya pencairan dana yang menyebabkan tertundanya program yang telah ditetapkan, dana yang didapat pada umumnya belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang telah disepakati dan kurangnya proses sosialisasi yang diberikan oleh pihak pelaksana pengguna dana PAKET P2KP. Kendala tersebut sangat mempengaruhi dalam sebuah implementasi kebijakan, tanpa adanya kepatuhan dari implementor maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil sebagaimana mestinya.

Karena Perlunya partisipasi dari semua pihak khususnya dari kalangan dinas

agar lebih banyak berpartisipasi dan melakukan sosialisasi kepada dinasnya atau ditingkat masyarakat agar hal ini dapat berdampak positif kepada pelaksanaan program PAKET itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino , Leo , 2006 , *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta

Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.

Dunn, William N, 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Islamy, Irfan, 1997, *Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.

Ibrahim. 2001, *Efektivitas Implementasi Program Pembangunan*. FISIP UNTAN, Pontianak.

Maleong, J, Lexy, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Nawawi, Hadari, 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Putra, Fadillah. 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset,

Suyanto, Bagong dan Sutinah, 2010, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Altrnatif Pendekatan*, Jakarta: kencana

Suharto, Edi.2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung. Refrika Adtama.

Sugito. 1995. *Studi Implementasi Kebijakan Tata Niaga jeruk di Kal-Bar*, Pontianak: FISIP UNTAN.

Sulistiani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI

Widodo.2008, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Dan aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang : Bayumedia Publishing.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : BUDI KURNIAWAN

NIM / Periode lulus : E01106093

Fakultas/Jurusan : ISIP / IAN

E-mail address/HP : 085245797644

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Program Penanggulangan kemiskinan Terpadu di Kelurahan Sangon Kecamatan Pontianak Timur.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
- ☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal

Dr. Erdi, M.Si

NIP. 196707272005011001

Dibuat di Pontianak
Pada tanggal: 02 Maret 2013

(BUDI KURNIAWAN)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).